

## ABSTRAK

### KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP KETENTUAN PIDANA DENDA BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG TIDAK MENYETORKAN PAJAK

Oleh

ANGGRAINI

Salah satu tindak pidana perpajakan yang cukup sering terjadi adalah terhadap tindak pidana wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana diatur dan dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "UU KUP"), dimana proses penegakan hukum pidananya seringkali menimbulkan problematika, khususnya terhadap segi penerapan pengganti pidana dendanya. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai proses penegakan hukum pidana terhadap wajib pajak badan yang melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, untuk kemudian mencari bentuk konsepsi ideal terhadap ketentuan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dan untuk analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu analisis data dengan obyek yang alamiah serta dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti dan diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan penulis, diketahui terdapat kekacauan penegakan hukum pidana terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP yang menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum pelaksanaannya, hal ini diakibatkan perbedaan dan ketidaksamaan terhadap pemahaman maupun penerapan mekanisme pidana denda yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP.

Oleh karena itu, diperlukan kesepahaman antara para pembentuk peraturan perundang-undangan dan aparat penegak hukum serta Hakim dalam memahami konteks penegakan hukum pidana pajak secara umum dan khususnya mengenai penerapan pengganti pidana denda agar proses penegakan hukum pidananya berjalan terintegrasi dan satu tujuan, dengan cara melakukan mereformulasi terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP, khususnya terhadap mekanisme dan penerapan penjatuhan pidana dendanya yang disesuaikan dengan asas, tujuan, dan filosofis ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang disesuaikan dengan prinsip dan ketentuan umum hukum pidana agar diperoleh konsepsi idealnya tersebut.

**Kata Kunci:** Kebijakan Formulasi, Pidana Denda, Wajib Pajak Badan, Tidak Menyetorkan Pajak.

## **ABSTRACT**

### ***POLICY FORMULATION OF CRIMINAL FINE FOR CORPORATE TAXPAYERS THAT DO NOT PAY TAX***

*One of the tax crimes that occurs quite often is the criminal act of taxpayers who deliberately do not deposit taxes that have been deducted or collected, so it can cause losses in national income as regulated and intended in the provisions of Article 39 paragraph (1) letter i of the Law Number 28 of 2007 on the Third Amendment to Law Number 6 of 1983 on General Provisions and Tax Procedures (hereinafter referred to as "UU KUP"), where the process of criminal law enforcement often causes problems, especially regarding the application of substitute criminal fines. Therefore, the author is interested in studying further about the process of criminal law enforcement against corporate taxpayers who commit criminal acts by deliberately not remitting taxes that have been deducted or collected, and then looking for an ideal conception of these provisions.*

*This research used normative juridical and empiricial judridicial approach, and to analyze data used qualitative analysis method, namely data analysis with natural object and done by describing dan explaining data that is researched and processed in detail into sentences in order to get a clear and convenient description, so that finally conclusions can be drawn.*

*Based on the results of this research, it is known that there is chaos in the criminal law enforcement against taxpayers who violate the provisions of Article 39 paragraph (1) letter i of UU KUP which gives rise to ambiguity and uncertainty in implementation of law, it is caused by differences and inequalities regarding toward understanding and application of the criminal fines mechanism that is regulated in provisions of Article 39 paragraph (1) letter i of the UU KUP.*

*Therefore, there is a need for understanding between the law makers, law enforcer, and judges in understanding the context of tax criminal law enforcement in general and in particular regarding the application of substitutes criminal fines so that the criminal law enforcement process is integrated and has one goal, by reformulating the provisions of Article 39 paragraph (1) letter i of the UU KUP, especially regarding the mechanism and implementation of the imposition of criminal fines which are adjusted to the principles, objectives and philosophy of the provisions of tax laws and regulations which are adjusted to the general principles and provisions of criminal law in order to obtain the ideal conception.*

**Keywords:** *Policy Formulation, Criminal Fine, Corporate Taxpayers, and Non-Remitting Taxe*